

SINOPSIS

Pada era globalisasi ini suatu organisasi dituntut untuk memberikan peluang maupun tantangan sebagai akibat dari kemajuan pesat ilmu dan teknologi, pendidikan dan pelatihan bagi aparatur merupakan tindak lanjut dari era reformasi yang menuntut aparatur memberikan kontribusi yang terbaik dalam melayani publik. Inti dari permasalahan penelitian ini adalah PNS kurang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing yang mana pada hakekatnya sasaran diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dalam penelitian ini mengambil judul tentang "Evaluasi Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Dalam Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Pemda Kabupaten Lahat Sumatera Selatan 2003-2004" perumusan masalah dalam skripsi ini adalah. Bagaimanakah kinerja badan kepegawaian daerah dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemda kabupaten Lahat Sumatera Selatan 2003-2004, untuk dapat menjelaskan dan menggambarkan secara obyektif perumusan masalah diatas, penulis menggunakan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisa data digunakan adalah teknik analisa kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek responsivitas, produktivitas, profesionalisme, akuntabilitas, tanggungjawab. dari beberapa aspek tersebut dapat disimpulkan kinerja BKD dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan sangat minim. hal ini terlihat dari aspek tanggungjawab BKD hanya dapat merespon 6,4% dari seluruh pegawai untuk mengikuti diklat dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan diklat yaitu faktor internal yang mencakup kurangnya motivasi, umur, adapun faktor eksternal ialah kurikulum yang tidak tepat. Aspek produktivitas, dalam melakukan rencana kegiatan diklat terdapat kelemahan-kelemahan yaitu tidak adanya penentuan waktu pelaksanaan dan target jumlah peserta serta masih kurangnya para peserta memanfaatkan manfaat dari diklat. Aspek profesionalisme, pengetahuan dan keahlian pengajar sesuai dengan bidangnya walaupun adanya keterbatasan peralatan yang ada, dan birokrasi kepanitiaan penyelenggara terlihat kaku. Aspek akuntabilitas, dalam melaksanakan diklat tidak adanya transparansi atau keterbukaan terhadap publik baik dari segi pertanggungjawaban tidak mempunyai mekanisme pertanggungjawaban publik. Aspek tanggungjawab yaitu proses seleksi yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan akan tetapi seperti proses birokrasi yang ada di Indonesia masih disinyalir praktek KKN.

Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diklat bagi pegawai Pemda Kabupaten Lahat sangat minim sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya dalam bentuk dapat merespon kebutuhan pegawai dan perencanaan yang matang dan melengkapi sarana prasarana dan fasilitas yang bervariasi sehingga diklat dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan yang dapat membawa dampak yang lebih baik bagi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lahat dimasa yang akan datang.